

2023



RANCANGAN RENJA SKPD

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
PUDING BESAR
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2021, Tujuan, Sasaran, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat komprehensif, karena didalamnya menyampaikan tentang kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian agar dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk mewujudkan “**Bangka Setara**” sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Puding Besar, 01 Agustus 2022
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19841130 200212 1 002

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	4
BAB.I : PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB.II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	37
BAB.III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaah terhadap kegijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	48
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023	58
BAB.V : PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Capaian IKU Tahun 2021	10
TABEL TC. 29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu	13
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	24
TABEL 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten	29
TABEL TC. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat OPD	37
TABEL 4.1	Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu. Tahapan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5

- Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun

Anggaran 2023 Lingkup Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra OPD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021. Pada tahun 2021 Kantor Kecamatan Puding Besar melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dan 11 Subkegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Perubahan sejumlah **Rp. 3.120.201.950,00** (Tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran **Rp. 2.539.599.091,00** (Dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar **81,39%**.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, capaian IKU Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	44,44	85,71	85,71	100,00	100,00	100,00

Secara umum capaian kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan Persentase Desa Berkembang mencapai 100 persen dari target akhir Renstra.

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel TC.29. dibawah ini :

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Bangka

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Renstra	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020		Target Kinerja dan Realisasi Kinerja						Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sd tahun berjalan						
							Program dan kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022		Realiasi capaian program dan kegiatan sd tahun berjalan (2022)		Tingkat capaian realisasi capaian renstra (%)		
							Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Tingkat capaian realisasi capaian renstra (%)				
4	5	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	01	Program Penunjang UrusaPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	27,00	4.065.153.120			25,93	3.120.201.950	25,93	2.539.599.091	25,93	2.539.599.091		26,50	4.065.153.120	27,00	100
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,35				10,70		10,70		10,70			11,30		11,35	100
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	100
				Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	60,15				6,01		6,01		6,01			60,10		60,15	100

				Indeks Sarana dan Prasarana	100			90		90		90			90		90	100
7	01	01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	199.462.392		100	10.033.200	100	10.030.800	100	10.030.800		100	199.462.392	100	100
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100			100		100		100			100		100	
7	01	01.2.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	21	104.132.416		7	5.458.800	7	5.458.800	7			100	104.132.416	21	100
7	01	01.2.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun (dokumen)	57	95.329.976		19	4.574.400	19	4.572.000	19			100	95.329.976	57	100
7	01	01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	6.144.609.054		100	2.227.592.400	100	1.662.632.560	100			99,95	6.144.609.054	100	100
				Persentase Penatausahaan Keuangan sesuai standar (%)	100			100		100		100			100		100	100
7	01	01.2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani (bulan)	36	6.144.609.054		12	2.227.592.400	12	1.662.632.560	12			100	6.144.609.054	36	100
7	01	01.2.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan	41,17	353.318.555		33,33	5.250.000	33,33	5.250.000	41,17			74,64	353.318.555	100	100

				kompetensi (%)														
				Persentase aparaturnya yang bekerja tepat waktu (%)	100			100		100				41,17		100	100	
				Persentase aparaturnya yang penilaiannya kinerjanya baik (%)	100			100		100				100		100	100	
7	01	01.2.06	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	105	173.470.000		35	5.250.000	35	5.250.000	35		100	173.470.000	105	100	
7	01	01.2.06	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)	12	179.848.555		4		4		4		4	100	12	100	
7	01	01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	289.003.000		100	52.075.000	100	51.860.000	100		100	289.003.000	100	100	
7	01	01.2.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Tertangani (bulan)	36	289.003.000		12	52.075.000	12	51.860.000	12		99,59	289.003.000	36	100	
7	01	01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	245.150.000		100	79.180.000	100	75.110.000	100		100	245.150.000	100	100	

7	01	'01.2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Diadakan (unit)	158	105.050.000		107	31.206.600	0	28.050.000	51		89,88	105.050.000	158	100
7	01	01.2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	12	140.100.000		9	47.973.400	0	47.060.000	3		98,10	140.100.000	12	100
7	01	01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	1.491.878.130		100	573.261.350	100	565.379.619	100		100	1.491.878.130	100	100
				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	9			3		3		3		3		9	100
7	01	01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	1.158.500.000		12	480.276.950	12	474.371.057	12		98,77	1.158.500.000	36	100
7	01	'01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa penyediaan internet yang tertangani (bulan)	36	131.203.330		12	34.597.000	12	33.171.700	12		95,88	131.203.330	36	100
7	01	'01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	202.174.800			58.387.400	12	57.836.862	12		99,06	202.174.800	36	100
7	01	01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	540.698.430		100	75.970.000	100		100		100	540.698.430	100	100

7	01	01.2.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	27	333.912.800		9	65.240.000	9	64.581.112	9		98,99	333.912.800	27	
7	01	01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	41.606.700		1	10.730.000	1	10.730.000	1		100	41.606.700	3	100
7	01	01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	165.178.930		1		1		1			165.178.930	3	100
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	130.165.750		83	14.940.000	83	14.925.000	88		93	130.165.750	93	100
7	01	02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100	130.165.750		100	14.940.000	100	14.925.000	100		99,99	130.165.750	100	100
7	01	02.2.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	7666	130.165.750		2600	14.940.000	2600	14.925.000	2486		99,99	130.165.750	2580	7666
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100	233.814.000		100		100		100		100	233.814.000	100	100

7	01	03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa/ Kelurahan Masyarakat yang aktif dalam Musrenbang	100	233.814.000			100	65.600.000	100	65.600.000	100			100	233.814.000	100	100	
7	01	03.2.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	3	57.264.000			1	6.750.000	1	6.750.000	1			100	57.264.000	3	100	
				Musrenbang Tingkat Desa (kali)	21				7		7		7						21	100
7	01	03.2.01	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun (kali)Penilaian lomba desa /Kel tk. Kecamatan (kali)	252	176.550.000			84	58.850.000	84	58.850.000	84			100	176.550.000	252	100	
				Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan (kali)	252				84		84		84						252	100
				Penilaian lomba desa /Kel tk. Kecamatan (kali)	3				1		1		1						3	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	82.750.000			100	5.100.000	100	5.100.000	100			100	82.750.000	100	100	
7	01	04.2.03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase Tomas/ Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	100	82.750.000			50	5.100.000	50	5.100.000	86,67			100	82.750.000	97	100	
7	01	04.2.03.	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh	6	82.750.000			2	5.100.000	2	5.100.000	2			100	82.750.000	6	100	

			Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (kali)															
7	01	'06.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100	140.923.250		100	11.200.000	100	8.400.000	100		100	140.923.250	100	100		
7	01	06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100	140.923.250		100	11.200.000	100	8.400.000	100		100	140.923.250	100	100		
				Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100	140.923.250		100	11.200.000	100	8.400.000	100		100	140.923.250	100	100		
7	01	'06.2.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	21	140.923.250		7	11.200.000	7	8.400.000	7		75,00	140.923.250	21	100		
				Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	21			7		7		7				21	100		

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran :

Sehubungan dengan kejadian luar biasa pandemi Covid 19, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka 2021. Terdapat beberapa program yang dihilangkan pelaksanaannya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021. yang memaksa penyesuaian terhadap target kinerja yang ingin dicapai. Kondisi ini juga menyebabkan Kantor Kecamatan Puding Besar melakukan penyesuaian atas target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar pada Tahun 2021 yang mengalami kebijakan refocusing antara lain :

- I Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- I.1 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- I.1.1 Sub.Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- I.1.2 Sub.Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- I.2 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub.Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Refocusing anggaran atas kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi beberapa target kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar sehingga dilaksanakan penyesuaian target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2021.

Selanjutnya capaian atas target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2023.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran

- | | | |
|-------|--------------|---|
| I | Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota |
| I.1 | Kegiatan | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| I.1.1 | Sub.Kegiatan | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| I.1.2 | | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| I.2 | Kegiatan | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| I.2.1 | Sub.Kegiatan | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| I.3 | Kegiatan | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| I.3.1 | Sub.Kegiatan | : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| I.4 | Kegiatan | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| I.4.1 | Sub.Kegiatan | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| I.4 | Kegiatan | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| I.4.1 | Sub.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| I.4.2 | | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| I.4.3 | | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| I.5 | Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |

Urusan Pemerintahan Daerah

- I.5.1 Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - I.5.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - II Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - II.1 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - II.1.1 Sub.Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - II.1.2 : Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - III Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - III.1 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - III.1.1 Sub.Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - IV Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - IV.1 Kegiatan : Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - IV.1.1 Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran
Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.
- d. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Kapasitas aparatur Kantor Kecamatan Puding Besar yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Kantor Kecamatan Puding Besar dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan aktifnya masyarakat mengikuti musrenbang desa/kelurahan.
5. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
6. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill sesuai kompetensi dan tugas utamanya.
8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2023 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan, berdasar nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3798 Tahun 2020, dimana Kecamatan Puding Besar akan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (dua puluh satu) subkegiatan .

Selanjutnya pada tahun 2021 Kantor Kecamatan Puding Besar melaksanakan urusan pemerintahan, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	-	-	44,44	85,71	100	100	44,44	85,71	100	100

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kantor Kecamatan Puding Besar telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar yang baik.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

2.3.1. Tingkat Pelayanan Kantor Kecamatan Puding Besar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum; Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kantor Kecamatan Puding Besar mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2019-2023 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
3. Meningkatnya desa yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya
4. Meningkatnya kualitas pelayanan

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka terdapat beberapa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bangka kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bangka;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)**, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Puding Besar sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kantor Puding Besar

Kantor Kecamatan Puding Besar memiliki peluang besar dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Bangka Sejahtera Tahun 2023. Dalam usaha pencapaian Tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut :

- Pentingnya peran Kantor Kecamatan Puding Besar yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Tingginya kepercayaan Bupati dan OPD terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Puding Besar dalam hal pelayanan prima kepada masyarakat
- Kualitas SDM Kantor Kecamatan Puding Besar yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya SOP dalam pemberian pelayanan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD.

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kantor Kecamatan Puding Besar. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD

Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023
Kabupaten Bangka

OPD : KECAMATAN PUDING BESAR

RANCANGAN AWAL						RANCANGAN AKHIR				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN					URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN					BIDANG URUSAN KECAMATAN				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.135.917.620,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.904.112.600,00
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,00				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,00	
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11,00				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11,00	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	59.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	48.040.000,00
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	7 Dokumen	19.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.000.000,00
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun	19 Dokumen	40.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3.475.000,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.675.000,00

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.675.000,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.915.000,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000,00
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4.300.000,00
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0%	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.514.561.400,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.274.097.200,00
			Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%				Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Yang tertangani	12 Bulan	2.499.561.400	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	19 Orang/bulan	2.261.477.200,00
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.720.000,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	3.955.000,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 Dokumen	4.945.000,00
			Indeks profesionalisme aparatur Perangkat Daerah	60,50				Indeks profesionalisme aparatur Perangkat Daerah	60,50	

7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	41,17%	200.505.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	41,17%	209.384.400,00
			persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	
			persentase aparat yang penilaian kinerjanya baik	100%				persentase aparat yang penilaian kinerjanya baik	100%	
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		121.350.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	120.229.400,00
			Jumlah Pakaian Dinas Harian yang tersedia	37 Stel	27.750.000					
			Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	16 Stel	10.400.000					
			Jumlah pakaian adat yang tersedia	37 stel	22.200.000					
			Jumlah pakaian Paskibra yang tersedia	20 stel	20.000.000					
			Jumlah pakaian Peserta STQ Tk.Kabupaten yang tersedia	40 stel	22.000.000					
			Jumlah pakaian olah raga paskibra	20 stel	12.000.000					
			Jumlah pakaian PSL Camat & Sekcam yang tersedia	2 Stel	7.000.000					
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	10.000.000,00
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puding Besar Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	4 Orang	79.155.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puding Besar Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	79.155.000,00
			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	214.900.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan	100%	267.661.175,00
								Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	

7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah layanan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 Bulan	164.900.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205.776.895,00
			Jumlah layanan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 Bulan	50.000.000					
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	31.567.140,00
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.317.140,00
			Indeks sarana dan prasarana aparatur	100				Indeks sarana dan prasarana aparatur	100	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah	100%	1.079.083.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah	100%	344.376.890,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puding Besar	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	3 Unit	560.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	254.717.365,00
			Mobil	1 Unit						
			Motor	2 Unit						
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	115 Buah	55.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	53.494.360,00
			Kursi Rapat	85 Buah	29.750.000					
			Kursi Kerja	7 Buah	7.250.000					
			Meja Rapat	2 Buah	12.000.000					
			Meja Kerja	4 Buah	6.000.000					
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puding Besar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 Unit & 1 Paket	64.083.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	36.165.165,00
			Laptop	1 Unit	10.967.000					
			Komputer PC	1 Unit	10.000.000					
			Printer	2 Unit	5.000.000					
			Gorden	1 Paket	20.000.000					

			Alat Pemadam Api	1 Unit	500.000					
			AC Split 2 PK	1 Unit	8.000.000					
			AC Split 1 PK	2 Unit	9.616.000					
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah bangunan gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	400.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-
			Gedung Kantor	1 Paket	400.000.000					
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	609.725.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan sarana prasana pendukung kinerja Pemerintah	100%	609.132.660,00
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan						
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Layanan Jasa Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	490.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	490.355.460,00
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	51.125.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.927.200,00
			Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani	12 Bulan						
			Jumlah layanan updating website yang tertangani	12 Bulan						
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	67.850.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.850.000,00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	458.143.220,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	151.420.275,00
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	1 unit Kendaraan Roda Dua, 9 Unit Kendaraan Roda Dua	112.243.220	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	95.530.275,00
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	25.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	20.590.000,00

7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	25.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	6 Unit	35.300.000,00
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Paket & 3 Unit	320.000.000					
			Gedung Kantor Camat	1 Paket	100.000.000					
			Pagar Kantor Camat	1 Unit	65.000.000					
			Rumah Dinas Sekcam	1 Unit	50.000.000					
			Gedung Serba Guna	1 Unit	30.000.000					
			Rumah Dinas Staf	1 Paket	75.000.000					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	48.415.014,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				48.415.000,00
								Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Puding Besar	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	48.415.014	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	48.415.000,00
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2580 dokumen	48.415.014	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	48.415.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				120.850.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				121.455.000,00
			Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%				Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	120.850.000,00	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	121.455.000,00
			Persentase Desa yg Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100%				Persentase Desa yg Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100%	
			Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%				Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%	
			Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Gotong Royong	100%				Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Gotong Royong	100%	

7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Musrenbang TK Kecamatan	1 kali	20.500.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	49 Lembaga	20.500.000,00
			Musrenbang TK Desa	7 desa						
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun	84 kali	100.350.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	100.955.000,00
			jumlah pembinaan	84kali						
			lembaga kemasyarakatan							
			Penilaian lomba desa /Kelurahan tingkat kecamatan	1 kali						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.350.000,00
			Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%				Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%	
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	97%	20.000.000,00	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	35.350.000,00
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2kali	20.000.000,00	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	35.350.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				47.800.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				63.650.000,00
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%				Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%	

			Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%				Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%			
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	47.800.000,00	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	63.650.000,00		
			Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%				Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%			
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	jumlah desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar	7 desa	47.800.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	161 Dokumen	63.650.000,00		
			Jumlah desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar	7 desa								
JUMLAH						5.372.982.634,00	JUMLAH					4.172.982.600,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Kantor Kecamatan Puding Besar didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Desa di Kabupaten. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Puding Besar selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.:

Tabel TC. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2022

Kabupaten Bangka

OPD : Kecamatan Puding Besar

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tema Pembangunan :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

Prioritas 1: Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan investasi disektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali

3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku

Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas :

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Nasional Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter

2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Meperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Prioritas 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

Program Prioritas :

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Infrastruktur Perkotaan;
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi digital;

Prioritas 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

Program Prioritas :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

Prioritas 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
5. Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dimaksud, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 : **"BANGKA SETARA"**

Sejahtera : Kondisi Masyarakat Yang Terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual Yang Ditunjukkan Oleh Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan Dari Kemiskinan SDM Yang

***Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Terciptanya
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah***

Mulia : Kondisi Masyarakat Yang Memiliki Harkat dan Martabat Serta Kedudukan Yang Setara/Mulia/Tinggi Karena Keberhasilan Dalam Pencapaian Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Ideal. Masyarakat Yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter Serta Peradaban Yang Bermartabat dan Unggul Dalam Menjadi Manusia Yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri dengan mengemban 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Untuk mengaktualisasikan misi yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, maka misi tersebut diformulasikan dalam tujuan sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kemandirian Desa ”

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. Dalam sasaran dirancang indicator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian di dalam program dan tujuan tersebut, berdasarkan misi yang diemban Kantor Kecamatan Puding Besar, yaitu:

- a. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- c. Meningkatnya desa yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan.

3.3. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Puding Besar maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah 11 kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
11. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.2. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah 32 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
12. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
13. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
14. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

15. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
17. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
18. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
20. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
29. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
32. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 antara lain meliputi:

Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 berjumlah 5 program, 11 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan

- a. lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Puding Besar
- b. total dana/pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebesar *Rp. 4.172.982.600.-***

BAB. IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023**

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023, Program dan Kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023;
- b. RKPD Kabupaten Bangka 2023;
- c. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Tahun 2019-2023.

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4. 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
Kabupaten Bangka

OPD : KECAMATAN PUDING BESAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.904.112.600,00				5.205.744.360,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		27,00				27,00	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,00				11,00	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	48.040.000,00			100%	54.870.000,00

		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
7.01.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	6 Dokumen	19.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	19.570.000,00
7.01.01.2.0 1.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	5 Dokumen	3.475.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.0 1.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	2 Dokumen	3.675.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.0 1.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	2 Dokumen	3.675.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.0 1.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	2 Dokumen	3.915.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	5.000.000,00

7.01.01.2.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	3 Laporan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Laporan	10.300.000,00
7.01.01.2.0 1.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	8 Laporan	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Laporan	5.000.000,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI		0%				0%	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2.274.097.200,00			100%	2.519.561.400,00
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
7.01.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	19 Orang/bulan	2.261.477.200,00	Dana Alokasi Umum	P1	19 Orang/bulan	2.499.561.400,00
7.01.01.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Dokumen	3.720.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	5.000.000,00

Keuangan SKPD									
7.01.01.2.0 2.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	2 Dokumen	3.955.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	7.500.000,00
7.01.01.2.0 2.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	40 Dokumen	4.945.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Dokumen	7.500.000,00
		Indeks profesionalisme aparatur Perangkat Daerah		60,50				60,75	
7.01.01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi		41,17%	209.384.400,00			41,17%	208.420.500,00
		persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	

		persentase aparat yang penilaian kinerjanya baik		100%				100%	
7.01.01.2.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	1 Paket	120.229.400,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	111.350.000,00
7.01.01.2.0 5.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	11 Dokumen	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	10.000.000,00
7.01.01.2.0 5.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka dan Luar Daerah	19 Orang	79.155.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	19 Orang	87.070.500,00
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1,50				2	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan		100%	267.661.175,00			100%	214.900.000,00
		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 Layanan				3 Layanan	
7.01.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Laporan	205.776.895,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	137.800.000,00
7.01.01.2.0 6.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Dokumen	31.567.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	32.900.000,00

7.01.01.2.0 6.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Dokumen	30.317.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	44.200.000,00
		Indeks sarana dan prasarana aparatur		100				100	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah		100%	344.376.890,00			100%	1.111.455.490,00
7.01.01.2.0 7.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	3 Unit	254.717.365,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Unit	576.800.000,00
7.01.01.2.0 7.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	1 Paket	53.494.360,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	56.650.000,00
7.01.01.2.0 7.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	9 Unit	36.165.165,00	Dana Alokasi Umum	P1	9 Unit	66.005.490,00
7.01.01.2.0 7.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	1 Unit	-	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	412.000.000,00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan sarana prasana pendukung kinerja Pemerintah		100%	609.132.660,00			100%	628.016.750,00
7.01.01.2.0 8.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Laporan	490.355.460,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	505.472.500,00

7.01.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Laporan	50.927.200,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	52.658.750,00
7.01.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	12 Laporan	67.850.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	69.885.500,00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	151.420.275,00			100%	468.520.220,00
7.01.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	9 Unit	95.530.275,00	Dana Alokasi Umum	P1	9 Unit	112.243.220,00
7.01.01.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	27 Unit	20.590.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	27 Unit	26.677.000,00
7.01.01.2.0 9.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	6 Unit	35.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Unit	329.600.000,00

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				48.415.000,00				49.867.464,42
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		100%				100%	
7.01.02.2. 04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan		100%	48.415.000,00			100%	49.867.464,42
<i>7.01.02.2.0 4.03</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	<i>Kec. Puding Besar Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>48.415.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>49.867.464,42</i>
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				121.455.000,00				124.475.500,00
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif		100%				100%	
7.01.03.2. 01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		100%	121.455.000,00			100%	124.475.500,00

		Persentase Desa yg Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang		100%				100%	
		Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		100%				100%	
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Gotong Royong		100%				100%	
7.01.03.2.0 1.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	49 Lembaga	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	49 Lembaga	21.115.000,00
7.01.03.2.0 1.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	26 Laporan	100.955.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 Laporan	103.360.500,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.350.000,00				20.600.000,00
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya		100%				100%	

7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum		100%	35.350.000,00			100%	20.600.000,00
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	24 Laporan	35.350.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	24 Laporan	20.600.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				63.650.000,00				49.234.000,00
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		100%				100%	
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		100%				100%	
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar		100%	63.650.000,00			100%	49.234.000,00
		Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		100%				100%	

2023

7.01.06.2.0 1.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Puding Besar Kab. Bangka	161 Dokumen	63.650.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	161 Dokumen	49.234.000,00
JUMLAH					4.172.982.600,00				5.449.921.324,42

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka pada Tahun 2023 serta mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dalam Tabel Evaluasi Renja Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puding Besar Tahun 2019-2023. Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dan Unit Kerja Kelurahan dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puding Besar Tahun 2023.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rancangan Pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur agar dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk itu diperlukan dokumen perencanaan kerja dari setiap OPD dalam lingkup Kabupaten Bangka berupa Rencana kerja dari masing-masing OPD.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Puding Besar, 01 Agustus 2022
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19841130 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN PUDING BESAR

Jalan Raya Sungailiat-Mentok, Puding Besar 33179 Kep.Bangka Belitung
Telepon 08117117666, Email : kec.pudingbesar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/031/19.01.08/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2023

CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- menyusun Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puding Besar

pada tanggal 01 Desember 2021

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si
PENATA TK I
NIP. 19841130 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/031/19.01.08/2022
TANGGAL : 01 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Arie Pamungkas, S.STP, M.Si	Ketua
2.	Ramdhan Usman, S.IP	Wakil Ketua
3.	Aminah, SE	Anggota
4.	M. Irfan, SE	Anggota
5.	Muhamad Nasri, S.IP	Anggota
6.	Marga Ansori Abdi, S.Ag	Anggota
7.	Zia Ulhaq, S.Hum	Anggota
8.	Fitriani	Anggota
9.	Dalina	Anggota

Ditetapkan di Puding Besar
pada tanggal 01 Desember 2021

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP, M.Si
PENATA TK I
NIP. 19841130 200212 1 002

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023	1-7 Desember 2021	Paling lambat minggu pertama Desember tahun 2021	Seluruh PD
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2022		Seluruh PD
3	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2022		Dinpemde, Desa/Kelurahan
4	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	1-4 Februari 2022	Paling lambat minggu kedua Februari 2022	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
5	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023	11 Februari 2022	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2022	Bappeda
6	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	14 Februari-11 Maret 2022		Seluruh PD
7	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan	1-4 Maret 2022	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati	Bappeda

	Bappeda)		diterima	
8	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2022		Bappeda dan Seluruh PD
9	Penetapan RKPD Kab. Bangka Tahun 2023 melalui Perbup	4 Juli 2022	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bagian Hukum Setda
10	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD Tahun 2023	5 Juli 2022		Bappeda
11	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	5-12 Juli 2022	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
12	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	6-26 Juli 2022	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
13	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	27-28 Juli 2022		
14	Penyampaian seluruh Ranhir Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup	29 Juli 2022		
15	Penetapan Renja PD Tahun 2023 melalui Perbup	2 Agustus 2022	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	

MAPPING SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR : 050-5899 TAHUN 2021

KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
UNSUR KEWILAYAHAN			UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN			KECAMATAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Terlaksananya Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang					

		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.						
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang	Musrenbang Tk. Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49	Lembaga	(PKK, LPM, BKM Karang Taruna, GAPOKTAN, LER Adat) x Jumlah
		Musrenbang Tingkat Desa						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Gotong royong di Desa	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	Laporan	12 Laporan Gotong Royong, 12 Laporan Pemberdayaan Masyarakat (PKK) Laporan Lomba laporan pelaksanaan STQ/MTQ Kecamatan
		Terlaksananya Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan					
		Terlaksananya penilaian lomba desa	Penilaian lomba desa /Kel tk. Kecamatan					
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

SubKegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	SubKegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24	Laporan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar					
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Meningkatnya Pembinaan dan Monitoring Keuangan Desa	Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa					
Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan administrasi desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	161	Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan keuangan desa	Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar					

(ADD (3 kali), D (3 kali), Laporan K (12 kali), R (2 kali), Rancangan APE (2 kali), Induk dan Perul (2 dok), LKPj Desa (2 dok) Jumlah Desa

CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.M.Si
NIP. 19841130 200212 1 002

KEPMEN : 050-3708 TAHUN 2020		KEPMEN 050-5889		
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja
2	3	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
PERENCANAAN		PERENCANAAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%	
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))</i>

		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))</i>
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan kinerja yang disusun</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>3 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah,)</i>
		<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>8 Dokumen (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)</i>
	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani</i> <i>Jumlah Laporan Keuangan yang disusun</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>19 Orang (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)</i>
		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)</i>

Ket : OPD Lain ditambahkan 1 Laporan LPPD, 4 Laporan Pelaksanaan DAK

		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>40 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)</i>	Keterangan : Kalau ada hibah, ditambahkan 12 Laporan Bulanan Hibah
	Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah		71,00		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi		
	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		
	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia</i> <i>Jumlah pakaian olah raga yang tersedia</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>	
		<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)</i>	Disesuaikan dengan OPD
<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>19 Orang (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)</i>	
	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	

			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas (Isi Dokumen berupa notulen rapat dan kelengkapannya serta laporan perjalanan dinas) Gaji Honor/Tenaga Kontrak Petugas Arsip (Isi dokumen berupa kumpulan arsip dinamis disetiap bulan) Gaji Honor/Tenaga Kontrak Pengelola Website, Pembayaran Langganan Internet (Isi dokumen berupa upload materi di website, pengelolaan SP4N Lapor)
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Sesuai dengan Rencana Pengadaan Perangkat Daerah dengan melihat sub kegiatan yang ada di Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1Unit	
	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah				

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Dokumen</i>	Isi Kegiatan Gaji Honorrer/Tanaga Kontra Petugas Ekspedisi, Operator Komputer, Administrasi Pemerintahan, Belanja ATK (Isi Laporan Buku Rekap Surat Masuk dan Keluar)
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani</i> <i>Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani</i> <i>Jumlah layanan updating website yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Dokumen</i>	Isi Dokumen (Bukti bayar jasa komunikasi, SDA dan Listrik)
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Dokumen</i>	Gaji Honorarium/Tenaga Kontrak Kebersihan, Penjaga Malam, Pengadaan alat kebersihan (Isi Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan dan jaga malam serta absensi)
	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>9 Unit</i>	
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>27 Unit</i>	

<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>6 Unit</i>
---	---	---	---	---------------

CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.M.Si
NIP. 19841130 200212 1 002